

Upaya Pengembangan Sektor Pariwisata Melalui Collaborative Governance di Kota Ponorogo

Adelia Dwi Cahyani¹, Lisa Suryati², Sinta Munawaroh³, Dian Suluh Kusuma Dewi^{4*}

¹²³⁴ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

¹²³⁴ Jl. Budi Utomo No.10, Ronowijayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471

email: dwicahyani.adelia1@gmail.com¹, lisasuryati19@gmail.com², sintamunawaroh61@gmail.com³, suluh.dian@gmail.com^{4*}

Abstract

This article aims to know the implementation of the principles of collaborative governance in the development of the tourism sector in the city of Ponorogo need a governance that can manage tourism in the current pandemic. This article was written using descriptive methods with qualitative approach Theory applied to achieve the objectives of this study is the theory which includes participation, acceptance, communication, trust and the principle of sharing. Tourism management needs special handling in the context of collaborative governance. Collaborative governance as a responsibility for the sustainability of tourism based on the incorporation of resources between the three pillars of governance. The implementation of collaborative governance practices aims to optimize the objectives of activities. Tourism development can remind economic growth in opening jobs, income and living standards in an area. In the management of tourism the role is not only done by one party but all supporting aspects involved in order to create experience and value of tourism benefits so as to provide benefits and benefits to the community to the environment. In this development does not involve only parties but starting from the community, the government as well as academics, private and stakeholders in the development area was implemented. The results of this study showed there are various forms of collaborative governance in the development of agrotourism tourism destinations Kedung Banteng.

Keywords: *Tourism; Collaborative Governance; Tourism Development;*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip collaborative governance dalam pengembangan sektor pariwisata di kota Ponorogo perlu adanya tata pemerintahan yang dapat mengelola pariwisata di masa pandemi saat ini. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif Teori yang diterapkan mencapai tujuan dari penelitian ini adalah yang meliputi partisipasi, akseptasi, komunikasi, kepercayaan dan prinsip berbagi. Pengelolaan pariwisata perlu adanya penanganan khusus dalam konteks governance yang bersifat collaborative. Collaborative governance sebagai jawaban untuk keberlanjutan dari pariwisata yang berbasis penggabungan sumberdaya antara ketiga pilar governance. Pelaksanaan praktik collaborative governance bertujuan untuk mengoptimalkan tujuan kegiatan. Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam membuka peluang kerja, pendapatan dan taraf hidup di suatu daerah. Dalam pengelolaan pariwisata peran tidak hanya dilakukan satu pihak tapi semua aspek pendukung yang terlibat dalam rangka menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan sehingga memberikan keuntungan serta manfaat pada masyarakat hingga lingkungan. Dalam pembangunan ini tidak hanya melibatkan satu pihak saja tetapi mulai dari masyarakat, pemerintah serta pihak akademisi, swasta dan stakeholders di wilayah pembangunan itu dilaksanakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat berbagai bentuk collaborative governance dalam pembangunan destinasi wisata agrowisata Kedung Banteng.

Keywords: *Pariwisata; Collaborative Governance; Pengembangan Pariwisata;*

*)Penulis Korespondensi

E-mail : suluh.dian@gmail.com

Pembahasan

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaannya sangat rentan terhadap bencana seperti pandemi saat ini, bahkan baik yang disebabkan oleh alam atau manusia itu sendiri. Pariwisata adalah industri yang selalu dihantui oleh krisis dan bencana bahkan bisa dikatakan rapuh karena sangat mudah untuk dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Yang paling penting karena keputusan perjalanan pariwisata dimulai dari

niat manusia, sehingga rentan terhadap persepsi risiko dan fluktuasi lingkungan. Sebagaimana besar manusia akan melakukan perjalanan wisata apabila destinasi yang dikunjungi terbebas dari bencana, gangguan keamanan dan tentu saja untuk bersenang-senang. Selain itu bencana merupakan kejadian yang tidak terduga serta tidak dapat dihindari oleh karena itu kebangkitan pariwisata di tandai dengan kompleksitas dan beberapa kriteria yang bertentangan dengan bencana (Henderson, 1999). Peristiwa bencana telah merubah tata pemerintahan (governance) sementara ini pemerintah dengan segala daya dan upaya membuat suatu kebijakan dan pengaturan untuk mitigasi bencana, masyarakat bahu membahu dengan lembaga swadaya masyarakat mencoba mempertahankan diri dan bangkit dari kesulitan sebagai dampak bencana, sedangkan industri berusaha membantu dengan berbagai program CSR (Corporate Social Responsibility). Salah satu dampak yang dapat dirasakan dari reformasi birokrasi adalah dalam bidang pembangunan fisik yang telah melahirkan pola baru yang mana pembangunan tidak hanya ditentukan dan dilaksanakan oleh satu pihak dalam hal ini pemerintah, tetap melibatkan semua pihak yang berkepentingan mulai dari masyarakat, pemerintah di semua tingkatan, pihak akademisi, swasta, dan stakeholders lain di wilayah pembangunan itu dilaksanakan. Pola ini lebih dikenal dengan pendekatan kolaborasi (Hardjito, 2011).

Collaborative governance merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan-urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi. Kolaborasi dimaknai berbeda dengan jaringan atau network dan kemitraan atau partnership. Kolaborasi digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Kolaborasi melibatkan pengelolaan hubungan untuk memanipulasi regulasi dan sistem sementara jaringan hanya berbicara pada pelaksanaan pekerjaan sipil. Selain dilihat dari tinjauan teori, kolaborasi telah menjadi prinsip pembangunan yang tertuang dalam undang-undang yang berkaitan tentang pembangunan salah satunya terdapat di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa yang juga terlahir sebagai buah dari reformasi birokrasi. UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembangunan perdesaan merupakan satu keterpaduan dengan sistem perkotaan. Adanya keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan pedesaan yang memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa bahkan sebaliknya dari desa sampai tingkat pusat melalui sebuah konsensus (UU No. 6 Tahun 2014).

Konsep *governance* ini lahir sebagai reaksi dari ketidak berhasilan konsep *new managerialism* (Saint-Martin, 2000), *new public management* (Andrisani, 2002) dan *new public management old and new* (Lynn, 2006) untuk mewujudkan administrasi publik yang berkeadilan sosial dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep *new managerialism* dari (Saint-Martin, 2000) pada prinsipnya beranggapan bahwa kinerja sektor publik dapat meningkat bila diterapkan prinsip managerial sebagaimana perusahaan swasta. Konsep *governance* sebenarnya lebih kompleks jika dibandingkan dengan *government* (Pierre, 2000) karena dalam *governance* terdapat 3 komponen yaitu pemerintah, dunia usaha/ swasta atau masyarakat sipil atau *civil society*. Hubungan diantara ketiganya harus dalam posisi sejajar, setara dan saling mengontrol untuk menghindari eksploitasi oleh satu komponen terhadap komponen yang lainnya. Tujuan dari tiga (3) komponen konsep *governance* yaitu saling peduli pada suatu permasalahan atau isu tertentu dan juga berbagi sumber daya ataupun resiko, tanggung jawab, ataupun manfaat (Dwiyanto, 2012). Sifat kolaborasi seperti ini membuat orientasi pada kepentingan jangka panjang dan memerlukan daya tahan dan interaksi yang cukup tinggi dari kedua belah pihak.

Dalam kerjasama *collaborative* masing-masing pihak diikat oleh adanya satu kepentingan bersama untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan oleh para pihak yang mengganggu kepentingannya. Kemauan untuk melakukan kerjasama muncul karena adanya keinginan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dirasakan bersama suatu organisasi publik dengan mitranya dari organisasi di sektor

privat. Keduanya merasa bahwa masalah apa kepentingan tersebut dapat diselesaikan dengan mudah apabila mereka bersama-sama bekerja untuk mencari solusi terhadap masalah atau kepentingan bersama tersebut masalah atau kepentingan bersama menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi perkembangan kolaborasi antara organisasi publik, privat, atau organisasi kemasyarakatan (Dwiyanto, 2012).

Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas masyarakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. Contohnya dalam Pemerintah di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu pemerintahan Desa di Kabupaten Ponorogo yang telah memanfaatkan kesempatan dengan baik. Melalui kolaborasi telah melakukan pembangunan destinasi agrowisata sebagai salah satu daya tarik tersendiri dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan desa secara mandiri. Kegiatan pembangunan tersebut menjadi menarik karena lahan yang dibangun adalah bekas lahan lokalisasi atau dapat dikatakan sebagai alih fungsi. Hal ini juga merupakan salah satu peningkatan kualitas pembangunan serta penerapan prinsip pembangunan yang bermoral, berkeadilan dan universal. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasitas internal yang dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelaksanaan program.

Berbagai indikasi penerapan *collaborative governance* di dalam alih fungsi lahan eks lokalisasi ini sangat banyak dan terjadi di semua tahapan. Pertama adalah keterlibatan masyarakat sipil dalam penyediaan bibit serta pengelolaan beberapa tempat atau destinasi. Kedua adalah bahwa komunikasi secara bersama-sama terus dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip *collaborative governance* yang meliputi partisipasi, akseptasi, komunikasi, kepercayaan dan prinsip berbagi pada kegiatan alih fungsi lahan eks. Lokalisasi Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Metode

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Susanti & Lubis, 2015). Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif bagaimana jenis metode ini lebih flexible bisa berubah untuk menyesuaikan dengan kondisi di wilayah tersebut, sehingga peneliti bisa merubah desain sesuai dengan kebutuhan (Gondo Widodo, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang menekankan pada pemahaman terkait persoalan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat terkait dengan hubungan - hubungan, kegiatan, sikap, pandangan dan juga proses yang sedang berlangsung atau sedang dilaksanakan (Simamora & Sinaga, 2016). Dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari beberapa sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, artikel dan dokumen lainnya baik cetak maupun online yang relevan sesuai dengan topik yang sedang dikaji pada penelitian ini. Fokus dari penelitian ini yaitu :

1. Kondisi pariwisata di Kabupaten Ponorogo.
2. Penerapan prinsip Collaborative Governance dalam pengembangan pariwisata di Ponorogo dalam masa pandemi saat ini.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Ponorogo memiliki potensi wisata yang cukup banyak yang menawarkan keanekaragaman daya tarik wisata. Jenis-jenis pariwisata tersebut, antara lain:

- a. Wisata alam : Telaga Ngebel, Bukit Cumbri, Puncak Pringgitan, Air terjun Pletuk, Gunung Mangge
- b. Wisata buatan : Waduk Bendo, agrowisata di Sukorejo, Mlokosewu
- c. Wisata budaya atau seni : Reog Ponorogo
- d. Wisata kuliner : Dawet jabung, pecel, sate ayam, gethuk golan, jenang mirah

Dari jenis-jenis pariwisata yang ditawarkan oleh Kabupaten Ponorogo, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Ponorogo hanya memfokuskan objek wisata yang butuh pengembangan. Namun juga terus memberikan pengembangan pada objek wisata yang masih dalam tahap pembenahan. Salah satu contoh dari objek wisata di Ponorogo yang melaksanakan konsep *Collaborative Governance* yaitu kegiatan alih fungsi lahan eks lokalitas menjadi kawasan agrowisata di Desa Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo, yang dilakukan melalui beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* alih fungsi lahan eks lokalitas menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, yaitu di mulai dari pembahasan atau musyawarah dalam membahas konsep agrowisata, yang diikuti oleh beberapa elemen masyarakat. Selain itu aspek partisipasi juga dilihat dari kegiatan kerja bakti oleh para warga masyarakat Kedung Banteng.

2. Prinsip Akseptasi

Dari prinsip akseptasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam alih fungsi lahan eks lokalitas menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, ditunjukkan dengan hadirnya beberapa pihak yang ikut andil dalam pembahasan alih fungsi lahan tersebut. Seperti halnya LSM, pihak swasta, masyarakat umum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentunya pihak pemerintahan Desa Kedung Banteng sendiri.

3. Prinsip Komunikasi

Prinsip komunikasi dalam pelaksanaan *collaborative governance* alih fungsi lahan eks lokalitas menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, menunjukkan berjalan dengan baik dan lancar. Seperti halnya kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat agar dimengerti akan pentingnya dan manfaatnya kawasan agrowisata bagi kesejahteraan masyarakat Kedung Banteng khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

4. Prinsip Kepercayaan

Prinsip kepercayaan dalam pelaksanaan *collaborative governance* terkait dengan alih fungsi lahan eks lokalitas menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, sudah berjalan baik. Walaupun terkadang masih mengalami kekurangan. Yang menjadi sedikit kekurangan adalah bahwa komunikasi masih berjalan secara searah. Hal ini wajar karena masyarakat harus memahami konsepnya terlebih dahulu pada tahap ini tetapi secara umum bahwa prinsip *collaborative governance* sudah berjalan dengan sangat baik.

5. Prinsip Berbagi/Share

Pelaksanaan *collaborative governance* terkait dengan alih fungsi lahan eks lokalitas menjadi kawasan agrowisata di Kedung Banteng, sudah menerapkan prinsip berbagi dari berbagai elemen. Hal ini ditunjukkan dengan kemauan warga dalam bekerja bakti secara bergiliran, pengadaan alat berat oleh pemerintah desa, dan kemaupuan pihak swasta yang menyewakan alat berat dengan harga yang murah. Selain itu, juga kesediaan warga yang menyediakan tempat untuk pertemuan, dan penyediaan konsumsi.

Dalam pengelolaan pariwisata maka peran tidak hanya dilakukan satu pihak tapi semua aspek pendukung yang terlibat. Selama ini paradigma yang berkembang adalah pengelolaan hanya dilakukan oleh pemerintah, namun sebenarnya pengelolaan harus dilakukan oleh semua pihak seperti swasta maupun masyarakat. Pemerintah selaku pengawas harus di imbangi swasta selaku investor dan juga masyarakat yang mempunyai pandangan konkrit lapangan dalam pengelolaan pariwisata.

Kesimpulan

Pengembangan kawasan wisata menjadi isu yang kompleks dimana dalam pengkajiannya dibutuhkan pendekatan multidimensional, baik secara fisik, ekonomi, sosial budaya dan juga politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya pengembangan kawasan wisata atau yang dikenal dengan industri pariwisata akan memberikan dampak secara langsung terhadap kondisi masyarakat. Pada umumnya pengembangan kawasan wisata dijadikan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, pemberdayaan perekonomian masyarakat, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha bagi warga masyarakat. Pembangunan tentang pariwisata memerlukan perhatian dan komitmen dari semua aktor termasuk pemerintah daerah, yaitu kolaborasi antar aktor, antar sektor dan antar lini secara berkelanjutan dan terintegrasi. Hal ini dapat terwujud jika pemerintah daerah dan pemangku kepentingan (stakeholders) menjalankan kebijakan dan perannya secara konsisten dan tertuang pada program dan kegiatan daerah melalui strategi pariwisata berkelanjutan. Strategi yang mendukung tindakan kolaboratif antara para stakeholders dalam perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan situs warisan dunia sebagai sebuah tujuan yang sangat di prioritaskan.

Kesimpulan dari pembahasan diatas bahwa dalam pengembangan kawasan agrowisata di Kedung Banteng telah memenuhi prinsip collaborative governance yaitu :

- a. Prinsip Partisipasi
- b. Prinsip Akseptasi
- c. Prinsip Komunikasi
- d. Prinsip Kepercayaan
- e. Prinsip Berbagi/Share

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo atas dukungannya hingga artikel ini selesai.

Daftar Pustaka

- Andrisani, P.J., Hakim, S. And Savas, E.S. (2002). *The New Public Management: Lessons From Innovating Governors and Mayors*, Kluwer, Massachusetts.
- Ansell, Chris and Alison Gash. (2007). "Collaborative Governance in Theoriand Practice", in *Journal of Pablic Administrasi Research and Theory* 18 : 543-571.
- Dwiyanto, Agus (2012). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusi dan Kolaboratif*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hermawati, R. S. (2021). Studi Alih Fungsi Lahan Eks Lokalisasi Kedung Banteng Menjadi Kawasan Agrowisata Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Dengan Pendekatan Collaborative Governance. *Jl@ P*, 10(1).
- Lynn, Jr, Laurence. E. (2006). *Public Management : Old and New*. New York : Routledge.
- Musanef (1995) *Manajemen Pariwisata di Indonesia*. Jakarta, Gunung Harta.
- Nugroho, I., & Hilman, Y. A. (2020). Sinergitas Program Fantastic! Ponorogo Dalam Rangka Pembangunan Pariwisata. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 220-229.
- Nurhadi, Febrianti Dwi Cahya. "Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)." *Jurnal Administrasi Publik* 2.2 (2014): 325-331.

- Pierre, Jon, and B. Guy Peters. (2000). *Governance, Politics and the State*. London: Mac Millan Press Ltd.
- Primadany, S. R. (2013). Analisis strategi pengembangan pariwisata daerah (studi pada dinas kebudayaan dan pariwisata daerah kabupaten nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(4), 135-143.
- Saint-Martin, D. (2000). *Building the New Managerialist State*, Oxford University Press, Oxford.
- Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Memperkuat Peran Pemerintah Daerah: Mengelola Pariwisata Lokal Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1-20.
- Yoeti, Oka, A. (2008) *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta, Pradaya Pratama.
- Zaenuri, M. (2018). Mengelola Pariwisata-Bencana: Perlunya Perubahan Paradigma Pengelolaan Pariwisata Dari Adaptive Governance Menuju Collaborative Governance. *Unisia*, 36(81), 157-168.